

**ANALISIS PENGARUH DAU, DAK DAN  
PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP  
ANGKA PARTISIPASI KASAR TINGKAT SD DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA  
TENGAH PERIODE 2003-2008**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**RAHMAT ADHIERIANTO**

**NIM. C2B007052**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2014**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rahmat Adhierianto  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007052  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH DAU, DAK  
DAN PENDAPATAN PERKAPITA  
TERHADAP ANGKA PARTISIPASI  
KASAR TINGKAT SD DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI  
JAWA TENGAH PERIODE 2003-  
2008**  
Dosen Pembimbing : Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto,  
M.Sc. Ph.D.

Semarang, 19 Agustus 2014

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto, M.Sc. Ph.D.)

NIP. 195811221984031002

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Rahmat Adhierianto  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007052  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH DAU, DAK  
DAN PENDAPATAN PERKAPITA  
TERHADAP ANGKA PARTISIPASI  
KASAR TINGKAT SD DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI  
JAWA TENGAH PERIODE 2003-  
2008**  
Dosen Pembimbing : Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto,  
M.Sc. Ph.D.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Agustus 2014

### Tim Penguji

1. Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc, Ph.D (.....)
2. Dr. Nugroho SBM, MSP (.....)
3. Evi Yulia Purwanti, SE, M.Si (.....)

Mengetahui

Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE., MCom., Ph.D., Akt.

NIP.196708091992031001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rahmat Adhierianto menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS PENGARUH DAU, DAK DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP ANGKA PARTISIPASI KASAR TINGKAT SD DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2003-2008** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

(Rahmat Adhierianto)

NIM : C2B007052

*I'm not an idealist anymore, I'm a bitter realist (Soe Hok Gie)*

**Skripsi ini dipersembahkan untuk Ibu dan**

**Bapak,**

**atas doa dalam sujud-sujud panjang**

## **ABSTRACT**

*In reducing interregional inequalities in public services, the Government transferring funds to the regions through multiple mechanisms, such as General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK). This study aims to demonstrate empirically that General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and the level of public welfare (represented by per capita income) take effect on improving access to education as measured through Gross Enrolment Rate (GER) elementary school level. Sampling in this study using a purposive method, with a total sample of 20 districts and 3 cities from populations of 35 local government in the province of Central Java at 2003-2008. This study uses panel data regression with random effect model (REM) approach to analyze the data. Results of statistical tests shows that the DAU and Per Capita Income gave significantly and positive effect to the elementary school level of GER.*

*Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Gross Enrollment Rate, Random Effect Model, Central Java*

## ABSTRAK

Dalam mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, Pemerintah Pusat melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme, seperti dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan tingkat kesejahteraan masyarakat (direpresentasikan oleh Pendapatan Perkapita) berpengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan yang diukur melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan total sampel 20 kabupaten dan 3 kota dari populasi 35 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2003-2008. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan *random effect model* (REM) untuk menganalisis data. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa DAU dan Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap APK tingkat Sekolah Dasar.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Angka Partisipasi Kasar, *Random Effect Model*, Jawa Tengah

## **KATA PENGANTAR**

Bismilahirrahmanirrahim

Segala puji syukur panjatkan ke Hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh DAU, DAK dan Pendapatan Perkapita terhadap Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2003-2008".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari semua pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Hadi Sasana, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si selaku Dosen Wali dan seluruh Dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan dan nasihat yang telah diberikan.



4. Bapak Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto, M.Sc, Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu disela kesibukan, dan telah sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama proses penelitian ini
5. Segenap Dosen-dosen, Staff, dan Karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas bantuan dan kemurahan hatinya, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Ibu, Bapak, dan Adik-adik tercinta, atas semua doa, semangat, perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan.
7. Sahabat-sahabat terbaikku : Maulana Syaiful Haq, Pradipta Febiyanto, Rizal Pramudiarta, Achmad Eko dan Nanda Harianto. Terimakasih atas semua petualangan, ilmu, dukungan, dan kesabaran dalam menghadapi penulis.
8. Sandy Juli Maulana, terimakasih atas diskusinya.
9. Kawan-kawan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, khususnya di jurusan IESP Angkatan 2007 : Aji, Dodi, Pambage dan puluhan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas semua kebersamaan selama masa perkuliahan.
10. Keluarga Besar Mizan FEB Undip, Insani Undip, Senat Mahasiswa KM Undip 2010, KAMMI Komisariat Ekonomi, KAMMI Daerah Semarang dan semua kawan-kawan yang sudah mengisi bagian dalam buku kehidupan penulis.

11. Keluarga besar Kos Ngesrep Timur IV No. 18 : Pak Warso dan keluarga, Mas Neil, Mas Rizal, Andre, dan Ghofar untuk penerimaannya selama ini.
12. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kelancaran penyusunan skripsi ini

Semarang, 19 Agustus 2014

Penulis

(Rahmat Adhierianto)

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Kelulusan Ujian.....	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
<i>Abstract</i> .....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	12
2.1.1. Landasan Teori.....	12
2.1.1.1. Teori Fungsi Pemerintah.....	12
2.1.1.2. Teori Makro Pengeluaran Pemerintah .....	13
2.1.1.3. Teori Federalisme Fiskal.....	15
2.1.2. Penelitian Terdahulu.....	18
2.2. Kerangka Pemikiran.....	27
2.2. Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	30
3.2. Populasi dan Sampel.....	34
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	35
3.5. Metode Analisis.....	36
3.5.1. Memilih Pendekatan yang Tepat.....	36
3.5.2. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	38
3.5.3. Menilai <i>Goodness of Fit</i> Model Regresi.....	45
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	48
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	48
4.2. Analisis Data.....	49
4.2.1. Estimasi Awal.....	49
4.2.2. Estimasi Final.....	52

4.2.3. Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2.4. Menilai <i>Goodness of Fit</i> Model Regresi.....	57
4.3. Interpretasi Hasil.....	58
BAB V PENUTUP.....	61
5.1. Simpulan.....	61
5.2. Keterbatasan.....	62
5.3. Saran.....	63
Daftar Pustaka.....	65
Lampiran-lampiran.....	68

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Durbin Watson d test: Kriteria Pengambilan Keputusan.....	44
Tabel 4.1 Rincian Sampel Penelitian.....	48
Tabel 4.2 Ringkasan Output dengan Pendekatan REM.....	53
Tabel 4.3 <i>Correlation Matrix</i> Variabel Independen.....	55
Tabel 4.4 Kriteria Pengambilan Keputusan: Deteksi Autokorelasi.....	56
Tabel 4.5 Arah dan Keterangan Variabel Hasil Estimasi.....	58

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perkembangan Alokasi DAU Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2005-2008 (miliar Rupiah).....	3
Gambar 1.2 Perkembangan Alokasi DAK Bidang Pendidikan Tahun 2003-2008 di Indonesia (miliar Rupiah).....	5
Gambar 1.3 Perkembangan Disparitas Angka Partisipasi Kasar tingkat SD Antardaerah di Provinsi Jawa Tengah.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	28
Gambar 3.1 Kriteria Penerimaan $H_0$ dalam Uji Statistik F.....	46
Gambar 3.2 Kriteria Penerimaan $H_0$ dalam Uji Statistik t.....	47
Gambar 4.1 <i>Boxplot</i> Deteksi Normalitas Residu.....	51
Gambar 4.2 Histogram - Deteksi Normalitas.....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Hasil Estimasi Awal.....	68
Lampiran B Deteksi Normalitas Residu Hasil Estimasi Awal.....	69
Lampiran C Hasil Estimasi Final.....	70
Lampiran D Deteksi Normalitas Residu Hasil Estimasi Final.....	71
Lampiran E Data Penelitian.....	72



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

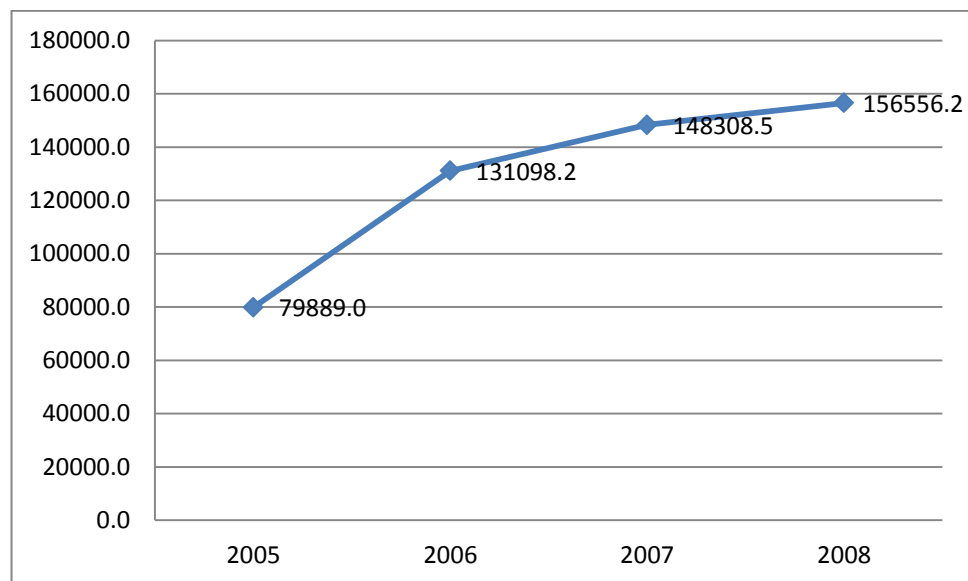
Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia. Pada masa pemerintahan Soeharto telah diatur dalam UU No. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya cenderung terjadi sentralisasi kekuasaan dan sumber daya di Pemerintah Pusat. Upaya serius untuk menerapkan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi diwujudkan dengan berlakunya dasar hukum yang baru, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut menegaskan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah yang lebih besar dibandingkan UU No. 5 Tahun 1975. Sehingga, para pengamat menyebut penerapan desentralisasi pada masa reformasi ini sebagai pendekatan *big bang*, karena mengubah secara drastis pola hubungan antara pusat dan daerah.

Desentralisasi fiskal yang merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya otonomi daerah di Indonesia mengikuti prinsip *money follows function*. Waluyo (2007) menjelaskan bahwa *money follows function* berarti penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Dalam prakteknya, daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Pusat tetap memainkan peranan penting

dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah. Dalam hal keuangan, Pemerintah Pusat bertanggung jawab menjaga keseimbangan alokasi dana antardaerah. Untuk itu, Pemerintah Pusat melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme, yaitu antara lain dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah guna membiayai kepentingan pelaksanaan pemerintahan secara umum, seperti belanja pegawai, pembiayaan pelayanan publik, pemeliharaan infrastruktur dan lain-lain. Undang-undang mengatur bahwa jumlah DAU secara nasional ditetapkan paling kurang 25% dari nilai APBN pada tahun bersangkutan. Sjafrizal (2012) menyatakan bahwa meskipun nilai APBN terus meningkat, maraknya pemekaran daerah menyebabkan jumlah DAU untuk masing-masing daerah tidak banyak mengalami perubahan, dan bahkan cenderung menurun untuk memenuhi kebutuhan dana perimbangan pada daerah otonomi baru yang jumlahnya cukup banyak.

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Alokasi DAU Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun**  
**2005-2008 (miliar Rupiah)**



*Sumber: DJPK Kemenkeu*

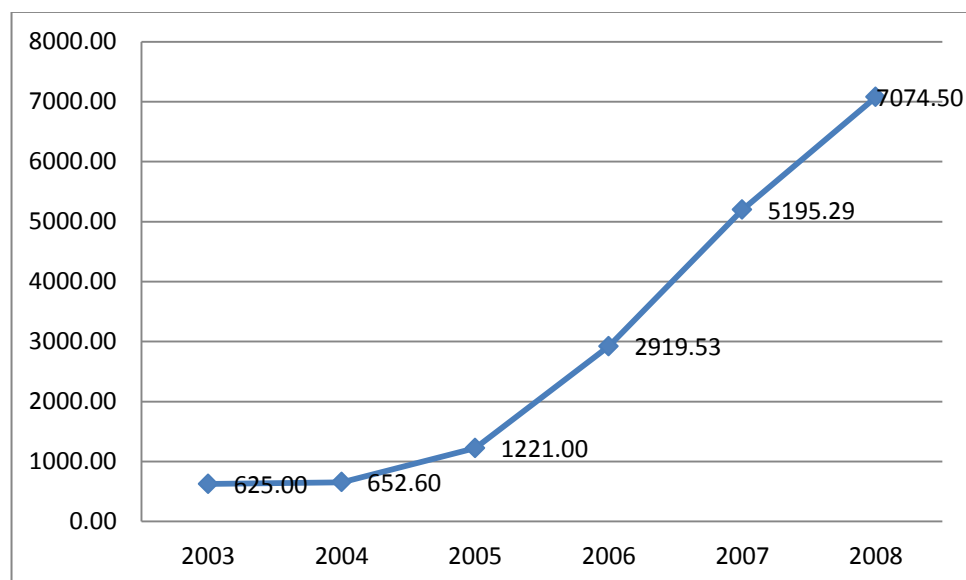
Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2005-2008, DAU Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari sisi besaran alokasi. Pada tahun 2005, dari total alokasi DAU Kabupaten/Kota sebesar 79.889 miliar, setiap kabupaten/kota mendapatkan alokasi rata-rata sebesar 184 miliar. Sjafrizal (2012) menjelaskan bahwa jumlah alokasi DAU ditentukan dengan menggunakan data dasar yang mencakup unsur penduduk, luas daerah, dan jumlah penduduk miskin serta sesuai dengan formula yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jumlah alokasi

DAU yang diterima tiap daerah tersebut digunakan untuk mengurangi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antardaerah.

DAU bersifat hibah umum (*block grant*); oleh karenanya, Pemerintah Daerah memiliki kebebasan dalam memanfaatkannya tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. Selain DAU, dukungan finansial dari Pemerintah Pusat kepada daerah juga diwujudkan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Sehingga, arah penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada setiap tahunnya sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi secara nasional.

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 31 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, pemerintah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Pusat juga mengarahkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada bidang pendidikan guna menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun.

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan Alokasi DAK Bidang Pendidikan**  
**Tahun 2003-2008 di Indonesia (miliar Rupiah)**

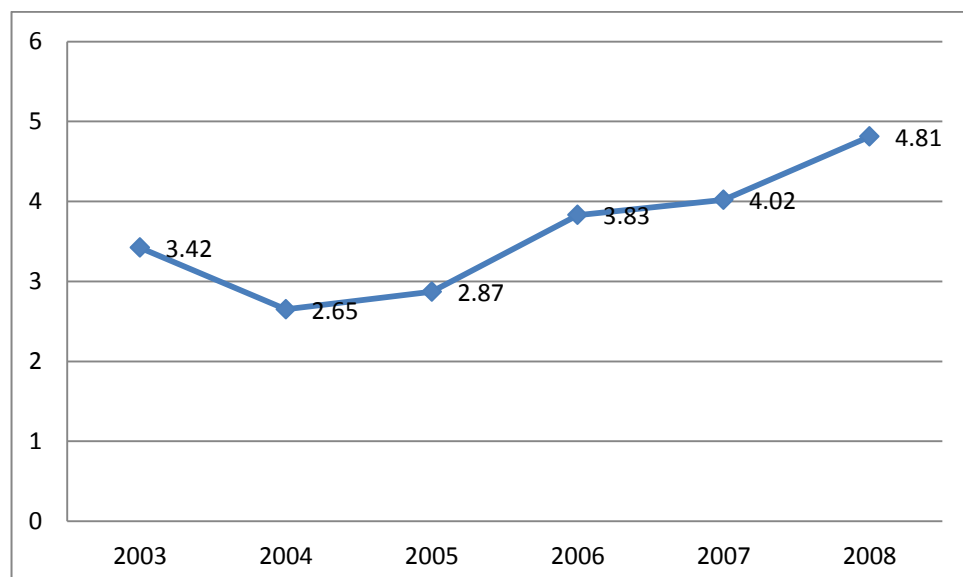


*Sumber: DJPK Kemenkeu*

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program Wajar 9 tahun tercermin dari alokasi DAK bidang pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak mulai diimplementasikan pada tahun 2003, DAK bidang pendidikan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari sisi besaran alokasi, yaitu sebesar 625 miliar pada tahun 2003 meningkat hingga 7.074,5 miliar pada tahun 2008. DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini diharapkan dapat memperbaiki mutu pendidikan melalui perbaikan infrastruktur.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia telah berhasil menyelesaikan program penuntasan Wajar 9 Tahun ditandai dengan diperolehnya penghargaan Widya Krama dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2008. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 menyebutkan bahwa keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) telah melebihi target nasional pada tahun ajaran 2007/2008, yaitu sebesar 59,22% untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, 107,31 % untuk tingkat SD, dan 96,93 % untuk tingkat SMP. Apabila dilihat perbandingan antardaerah dari segi kesenjangan/disparitas menunjukkan tren yang semakin meningkat seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1.3.

**Gambar 1.3. Perkembangan Disparitas Angka Partisipasi Kasar tingkat SD Antardaerah di Provinsi Jawa Tengah**



*Sumber: BPS, diolah*

Berdasarkan gambar 1.3, disparitas akses pendidikan tingkat SD antardaerah di Provinsi Jawa Tengah yang diukur menggunakan nilai standar deviasi dari Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tren yang semakin meningkat, dimana tingkat SD merupakan sasaran utama alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dari tahun 2003 sampai 2009. Efektivitas input bidang pendidikan dalam hal ini berupa Dana Perimbangan (DAU dan DAK) yang termasuk belanja daerah pada keuangan Pemerintah Pusat diduga akan mempengaruhi *outcome* dari penggunaan dana tersebut, dalam penelitian ini diukur melalui APK tingkat SD.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Pada dasarnya penelitian ini dilandasi dengan kerangka berpikir bahwa tujuan transfer dana dari Pemerintah Pusat selain bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah, juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Dalam penelitian ini, secara lebih spesifik transfer dana yang dimaksud adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan, sedangkan pelayanan publik yang dimaksud adalah akses pendidikan pada tingkat SD. Dari uraian pada latar belakang masalah di atas diketahui masih ada kesenjangan antar daerah dalam akses pendidikan tingkat SD yang diukur melalui Angka Partisipasi Kasar (APK).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan spesifik dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pengaruh variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang menjadi latar belakang penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah



### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.2.1. Kegunaan Akademis**

Secara akademis penelitian ini diharapkan sebagai :

1. Bukti empiris pengaruh Dana Perimbangan (DAU dan DAK) terhadap Angka Partisipasi Kasar pada tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
2. Tambahannya informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya

#### **1.3.2.2. Kegunaan Praktis**

Dalam kaitannya dengan pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan sebagai:

1. Masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan alokasi anggaran dalam APBN/APBD.
2. Sebagai solusi atas permasalahan yang terkait dengan masalah akses pendidikan, khususnya terkait dengan disparitas antardaerah

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini disusun dalam 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang perlunya analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang ini

kemudian menjadi dasar bagi perumusan masalah pada bagian selanjutnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Kegunaan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu kegunaan secara akademis dan kegunaan secara praktis.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, berisi landasan-landasan teori yang menjadi dasar dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang relevan sehingga mendukung tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsi pemerintah, teori pengeluaran pemerintah, dan teori federalisme fiskal. Pada bab II ini juga akan dijelaskan penelitian terdahulu yang merupakan dasar pengembangan penulisan penelitian ini, sehingga dapat disusun kerangka penelitian dan hipotesis.

**Bab III Metodologi Penelitian**, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *random effect model (REM)* yang diolah menggunakan *software* Eviews 8.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan**, menguraikan deskripsi objek penelitian yang memuat rincian sampel dari data yang telah dikumpulkan. Bab ini juga memuat analisis data yang menjelaskan hasil estimasi dari penelitian yang

dilakukan. Bagian selanjutnya, yaitu interpretasi hasil, menjelaskan hasil penelitian secara komprehensif.

**Bab V Penutup**, memuat kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini mendasarkan pada teori-teori yang relevan sehingga mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori fungsi pemerintah, teori pengeluaran pemerintah, dan teori federalisme fiskal.

Selain itu, agar secara empiris dapat dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sejenis atau yang memiliki tema hampir sama, maka dilengkapi juga dengan beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh instrumen keuangan pemerintah terhadap akses pendidikan. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut sekaligus menjadi acuan dan komparasi dalam penelitian ini.

#### **2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1. Landasan Teori**

###### **2.1.1.1. Teori Fungsi Pemerintah**

Guritno (2008) menjelaskan bahwa dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat di klasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu:

###### **1. Peranan Alokasi**

Peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.

## 2. Peranan Distribusi

Selain berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, peranan lain dari pemerintah adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Dalam peranan distribusi, pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan dengan pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi yang berpendapatan lebih tinggi dan lebih ringan bagi yang berpendapatan rendah. Sedangkan, secara tidak langsung pemerintah mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya perumahan mewah untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi pupuk, dan sebagainya.

## 3. Peranan Stabilisasi

Selain peranan alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peranan utama sebagai alat stabilisasi perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi.

### **2.1.1.2. Teori Makro Pengeluaran Pemerintah**

Guritno (2008) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan

biaya yang harus di keluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah lebih besar dari total investasi, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pada tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan karena perkembangan ekonomi. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih pada bentuk pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program layanan kesehatan masyarakat.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap *Gross National Product* (GNP). Dalam hal ini, Wagner

menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Dasar pandangan Wagner tersebut adalah teori organis mengenai pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

### **2.1.1.3. Teori Federalisme Fiskal**

Teori federalisme fiskal yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Teori Oates

Oates (dikutip oleh Prasetyia, n.d.) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena Pemerintah Subnasional/Pemerintah Daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level Pemerintah Daerah akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi.

Desentralisasi fiskal memungkinkan terjadinya korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal dan birokrat yang mendapatkan akses dan peka terhadap kepentingan kelompok lokal. Oates

juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Pembelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh Pemerintah Daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan Pemerintah Pusat. Menurut Oates, daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya. Selain itu, hibah antar pemerintah (disebut sebagai transfer) juga dirancang untuk memberi dukungan keuangan pada level pemerintahan yang lebih rendah.

Oates berpendapat bahwa dalam sistem fiskal pemerintah, ketiga fungsi pemerintah tidak sama-sama cocok untuk semua tingkat pemerintahan dan efisiensi terwujud jika fungsi telah sesuai dengan tingkat yang tepat dari pemerintah. Secara umum, Oates berpendapat bahwa kontrol Pemerintah Pusat hanya terhadap kebijakan moneter dan fiskal dalam upaya untuk stabilitas harga dan pekerjaan.

## 2. Teori Bahl

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money follows function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan *derivatif* dari kebijakan otonomi



daerah melalui pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat ke daerah. Maksudnya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan maka biaya yang dibutuhkan oleh daerah cenderung semakin besar.

Bahl (dikutip oleh Prasetyia, n.d.) mengemukakan bahwa desentralisasi harus memacu persaingan di antara pemerintah lokal untuk berkompetisi (*there must be a champion for fiscal decentralization*). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami dengan benar dan memberikan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain. Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, Dana Perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Menurut Bahl, desentralisasi fiskal memiliki beberapa keuntungan yaitu:

1. Keuntungan karena wewenang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang lebih dekat dengan masyarakat. Argumen efisiensi ini mendorong pemikiran kebanyakan ahli ekonomi.
2. Mobilisasi keseluruhan penerimaan dapat ditingkatkan karena desentralisasi dapat memperluas objek pajak
3. Jika desentralisasi fiskal telah cukup jauh berlangsung maka distribusi kota dalam ukuran yang lebih baik akan dihasilkan.

### **2.1.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya : penelitian yang dilakukan oleh Jean-Paul Faguet dan Fabio Sanchez (2008) yang berjudul *Decentralization's Effects on educational outcomes in Bolivia and Columbia*. Penelitian mengukur pengaruh faktor-faktor seperti karakteristik daerah, ketersediaan sumber daya (faktor penawaran), partisipasi politik dan kerjasama, dan faktor-faktor sosial-ekonomi-geografis terhadap peningkatan angka partisipasi kasar di Columbia.

Penelitian lain yang juga menjadi acuan utama dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shinta Doriza, Deniey Adi Purwanto dan Ernita Maulida (2013) dengan judul “Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Akses Pendidikan Dasar di Indonesia.” Penelitian tersebut menggunakan metode analisis data panel dengan pendekatan *fixed-effect* dengan sampel 440 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2005-2009. Penelitian tersebut menggunakan variabel-

variabel yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Faguet (2006), yaitu antara lain disparitas akses pendidikan dasar yang diukur melalui disparitas APK tingkat SD dan SMP, faktor desentralisasi (DAU, DAK Pendidikan, DAK Non-Pendidikan, PAD), faktor sosial ekonomi (PDRB perkapita, angka melek huruf, persentase kemiskinan), *dummy* daerah (kabupaten atau kota, daerah pemekaran atau bukan daerah pemekaran serta Pulau Jawa atau bukan Pulau Jawa).

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan. Penelitian ini menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan, dan pendapatan perkapita sebagai variabel independen, dengan variabel dependen yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD. Penggunaan DAU dan DAK bidang Pendidikan juga dilakukan oleh Doriza, dkk (2013), akan tetapi dengan satuan Rupiah/kapita. Penggunaan variabel Angka Partisipasi Kasar merupakan adaptasi dari penelitian Faguet dan Sanchez (2008). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Doriza, dkk (2013) yang menggunakan nilai disparitas dari Angka Partisipasi Kasar tersebut.

Tabel 2.1 akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang menunjang serta menjadi acuan serta dan dasar dalam penelitian ini.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hiroko Uchimura dan Johannes Jutting	<i>Fiscal Decentralisation, Chinese Style: Good for Health Outcomes?</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk membandingkan kinerja pemerintah daerah (<i>county</i>) yang lebih terdesentralisasi dengan negara di mana provinsi (<i>province</i>) memainkan peran lebih besar dalam penyediaan layanan publik</li> <li>2. Untuk mengetahui peran transfer antar pemerintah dalam menjelaskan <i>outcomes</i> kesehatan yang berbeda</li> </ol>	<p>Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel penjelas, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel dependen: <i>outcome</i> kesehatan, diukur dari angka kematian bayi provinsi per 1000 kelahiran hidup (IMR)</li> <li>2. Variabel penjelas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Indikator desentralisasi fiskal, yaitu Keseimbangan Vertikal (VB) dan rasio pengeluaran daerah terhadap total belanja provinsi (RCE)</li> <li>b. Karakteristik sosial-ekonomi, diukur melalui tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran di tingkat provinsi</li> </ol> </li> </ol>	Daerah yang lebih terdesentralisasi memiliki angka kematian bayi lebih rendah dibandingkan dengan daerah dimana Pemerintah Provinsi mempunyai peran lebih besar

2	Jean-Paul Faguet dan Fabio Sanchez	<i>Decentralization's Effects on educational outcomes in Bolivia and Columbia</i>	Untuk mengeksplorasi dampak desentralisasi pada <i>outcomes</i> pendidikan publik	<p>Penelitian mengeksplorasi pelaksanaan desentralisasi di Bolivia dan Columbia</p> <p>1. Pada negara Bolivia, model estimasi yang digunakan adalah:</p> $G_{mt} = \beta_1 \alpha_m + \beta_2 \alpha_m^* + \beta_3 \delta_t + \varepsilon_{mt}$ <p>Dimana:  <math>G_{mt}</math> = investasi publik menurut sektor (pendidikan, kesehatan, dll)  <math>\alpha_m</math> dan <math>\delta_t</math> = vektor dari variabel <i>dummy</i> negara bagian dan tahun (<math>\alpha_m^* = \alpha_m D_t</math>)  <math>D_t</math> = Variabel <i>dummy</i> desentralisasi (nilai 0 untuk masa sebelum 1994 dan nilai 1 untuk masa setelah 1994), dengan m adalah kota dan t adalah tahun</p> <p>2. Pada negara Columbia, model estimasi yang digunakan adalah:</p> $\Delta S_{mt} = \alpha + \zeta D_{mt} + \beta R_{mt} + \gamma P_{mt} + \delta C_{mt} + \varepsilon_{mt}$ <p>Dimana:  <math>\Delta S</math> = peningkatan partisipasi siswa dari tahun-ke-tahun di sekolah negeri  D = vektor ukuran di mana kota terletak pada kontinum desentralisasi-sentralisasi  R = vektor ukuran ketersediaan sumber daya (yaitu faktor <i>supply</i>) yang mungkin secara independen meningkatkan</p>	<p>1. Bukti empiris pada Bolivia menunjukkan bahwa investasi publik di bidang pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal yang riil.</p> <p>2. Pada kasus Columbia, desentralisasi meningkatkan angka partisipasi di sekolah umum. Di kabupaten dimana pembiayaan pendidikan dan perumusan kebijakan berada di bawah kontrol lokal yang lebih besar, partisipasi meningkat. Di kabupaten dimana pembiayaan pendidikan masih berdasarkan kontrol</p>
---	------------------------------------	---	---	--	---

				partisipasi siswa P = vektor dari variabel mengukur partisipasi dan keterlibatan politik C= vektor dari variabel kontrol sosial ekonomi dan geografis, semua di-indeks oleh kotamadya m dan tahun t	pusat, partisipasi rendah.
3	Mamay Sukaesih	Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akses Pendidikan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 1995-1997 dan 2003-2006)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis alokasi pemerintah dalam desentralisasi fiskal (DAU, DAK pendidikan) terhadap pengeluaran bidang pendidikan pemerintah kabupaten/kota</li> <li>2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan SD, SMP, dan SMA</li> </ol>	<p>Model yang digunakan dalam penelitian ada 2, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan <math>eduspend_{it} = f(dak_{it}, dau_{it}, ycap_{it}, ddes)</math></li> <li>2. Model Akses Pendidikan <math>ger = f(eduspend_{it}, ilterate_{it}, ycap_{it}, ddes)</math></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota</li> <li>2. DAK berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota</li> <li>3. Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan masyarakat, daripada DAK</li> </ol>

			3. Menganalisa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota dan akses masyarakat terhadap pendidikan SD, SMP, dan SMA		4. Tingkat akses pendidikan masyarakat juga lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan masyarakat
4	Nadir Habibi, Cindy Huang, Diego Miranda, Victoria Murillo, Gustav Ranis, Mainak Sarkar, dan Frances Stewart	<i>Decentralization and Human Development in Argentina</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk melihat desentralisasi di Argentina dari waktu ke waktu</li> <li>2. Untuk mendokumentasikan dampak positif desentralisasi pada kesehatan dan pendidikan, dan hubungan empiris antara desentralisasi fiskal dan</li> </ol>	<p>Penelitian menggunakan model estimasi sebagai berikut:  <math>y_{it} = \alpha + x_{it}\beta + u_{it}</math> untuk <math>i=1,2,\dots,N</math> dan <math>t=1,2,\dots,T</math></p> <p>Dimana:  <math>y_{it}</math> = angka kematian bayi (IMR) atau rasio siswa yang terdaftar di sekolah menengah per 1.000 siswa SD (EDUC) untuk provinsi <math>i</math> pada periode <math>t</math>  <math>\alpha</math> = skalar  <math>\beta</math> = <math>K \times 1</math> vektor koefisien yang akan diestimasi  <math>x_{it}</math> = vektor variabel eksogen untuk provinsi <math>i</math> di periode <math>t</math></p>	1. Selama periode 1970-1994, beberapa tren jangka panjang, termasuk desentralisasi fiskal dan demokratisasi pada tingkat provinsi menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kesenjangan antar daerah dan peningkatan yang

			<p>pembangunan manusia.</p>	<p>N = 23 dan T = 25</p> <p>Yang termasuk variabel eksogen, antara lain: PDB Provinsi perkapita (PGBCAP), Jumlah pekerja publik per 1000 penduduk provinsi (PUBEPOP), Total belanja perkapita provinsi (EXPCAP), Pajak provinsi dibagi total sumber daya dikendalikan propinsi (OWNLOCAL), sumber daya yang dikendalikan propinsi dibagi total sumber daya propinsi (LOCALRAT), Rasio bagi hasil terhadap sumber daya yang dikendalikan (ROYRAT), Rasio transfer bersyarat dari pusat, termasuk Kontribusi Kekayaan Nasional atau ATN terhadap sumber daya yang dikuasai (CONDRAT)</p>	<p>cukup besar dalam tingkat pembangunan manusia di seluruh wilayah</p> <p>2. Angka kematian bayi memiliki hubungan yang signifikan dan negatif dengan variabel OWNLOCAL dan LOCALRAT. Hasil regresi untuk output pendidikan juga menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan variabel terikat</p>
5	Shinta Doriza, Deniey Adi Purwanto, Ernita	Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Akses Pendidikan Dasar di Indonesia	Untuk menjawab berbagai permasalahan dalam mengoptimalkan desentralisasi fiskal dalam	<p>Model yang digunakan dalam penelitian adalah:</p> $AS_{i,t} = \alpha_i + \gamma FD + \delta S_{i,t} + \lambda D_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$	1. Instrumen fiskal yang bersifat khusus (DAK) memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan



	Maulida		<p>peningkatan pemerataan akses pendidikan dasar dan sekaligus dapat berkontribusi terhadap penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan dasar dan pengelolaan keuangan pemerintah.</p>	<p>Dimana:  AS = disparitas akses pendidikan dasar (disparitas APK SD dan SMP)  FD = Faktor Desentralisasi (DAU, DAK Pendidikan, DAK Non-Pendidikan, PAD)  S = Faktor sosial ekonomi (PDRB perkapita, angka melek huruf, persentase kemiskinan)  D = <i>Dummy</i> daerah (kabupaten atau kota, daerah pemekaran atau bukan daerah pemekaran serta Pulau Jawa atau bukan Pulau Jawa)</p>	<p>instrumen yang bersifat umum. PAD terbukti berdampak negatif terhadap disparitas akses pendidikan tingkat SD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tingkat pendidikan masyarakat tidak membedakan akses terhadap pendidikan pada tingkat SD namun cukup signifikan pada tingkat SMP</li> <li>3. Tingkat Kemiskinan berdampak cukup signifikan terhadap disparitas akses pendidikan dasar</li> <li>4. Faktor karakteristik daerah juga terbukti mempengaruhi disparitas akses pendidikan dasar</li> </ol>
--	---------	--	--	---	---

6	Solechah	Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap <i>Outcomes</i> Pelayanan Publik Bidang Pendidikan	Untuk melihat dampak dari desentralisasi fiskal terhadap <i>outcomes</i> pelayanan publik di bidang pendidikan	<p>Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:</p> $APS_i = \beta_0 + \beta_1 DF_1 + \beta_2 PDRBC_i + \beta_3 MDG_i + e_i$ <p>Dimana:          APS = Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK          DF = Desentralisasi fiskal yakni rasio-realisasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah provinsi          PDRBC = Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita berdasarkan harga yang berlaku          MDG = Rasio murid per guru          e = Error          i = Time series (2007-2009)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desentralisasi fiskal yang dihitung berdasarkan rasio total pengeluaran kabupaten/kota terhadap total pengeluaran provinsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan Angka Partisipasi Sekolah</li> <li>2. Pendapatan perkapita masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah</li> <li>3. Rasio murid dan guru berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah</li> </ol>
---	----------	--	--	---	--

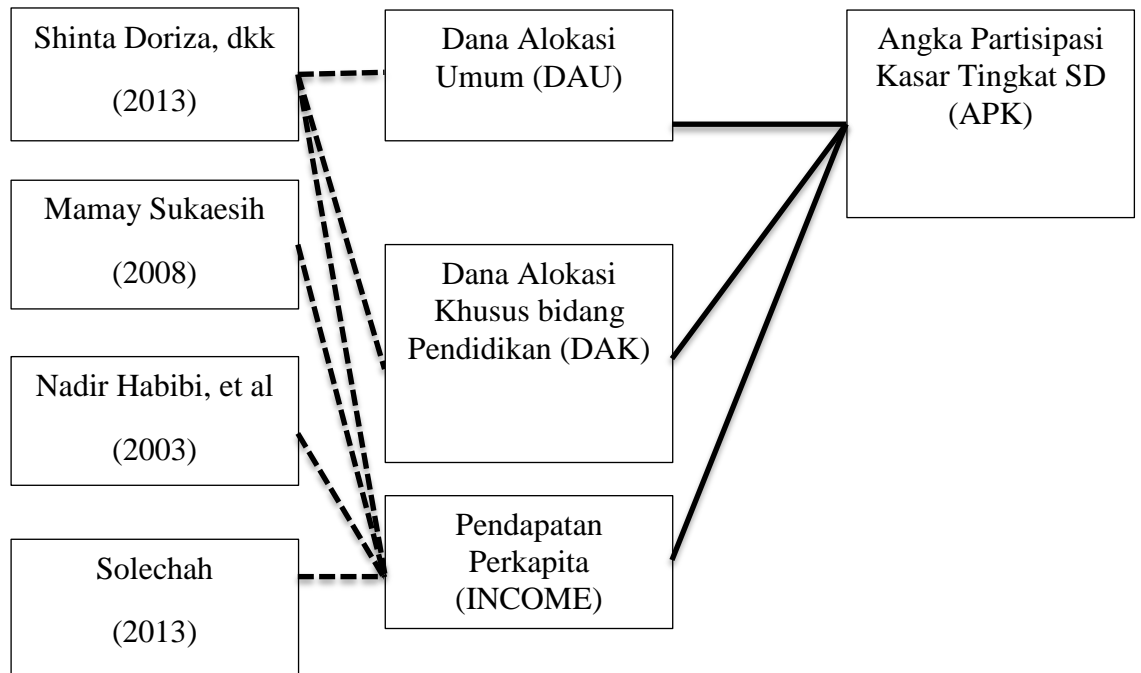
## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Brodjonegoro (2003) mengemukakan bahwa proses desentralisasi akan dapat berkontribusi terhadap reformasi ekonomi Indonesia, khususnya dalam menurunkan disparitas antardaerah. Dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat melakukan transfer dana ke daerah, diantaranya melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan dari transfer dana itu sendiri adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator untuk mengukur hasil dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan. Penggunaan variabel Angka Partisipasi Kasar tingkat SD dalam penelitian ini didasarkan pada sasaran utama alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2003 sampai 2009. Maka dalam penelitian ini diharapkan mampu menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal yang tercermin melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar tingkat SD.

Gambar 2.1 menjelaskan secara ringkas kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini mencakup variabel yang digunakan dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam pengambilan variabel tersebut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



### 2.3.Hipotesis

Desentralisasi fiskal di Indonesia mengikuti prinsip *money follows function*. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Pusat tetap memainkan peranan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah. Untuk menjaga keseimbangan alokasi dana antardaerah, Pemerintah Pusat melakukan transfer melalui beberapa mekanisme, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah, transfer juga bertujuan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Berbagai studi telah dilakukan untuk mengukur pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pelayanan publik, khususnya dalam bidang pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Faguet dan Sanchez (2008) membuktikan bahwa desentralisasi meningkatkan angka partisipasi di sekolah umum di Kolombia, yang diukur melalui *Gross Enrollment Rate* atau Angka Partisipasi Kasar. Penelitian lain yang dilakukan oleh Doriza, dkk (2013) menemukan bahwa instrumen fiskal berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap disparitas Angka Partisipasi Kasar (APK) antarprovinsi, jika dibandingkan dengan dampak penggunaan instrumen fiskal yang bersifat umum, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Kasar tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
- H2 : Diduga Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Kasar tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
- H3 : Diduga pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Kasar tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan *random effect model* (REM). Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003-2008.

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1. Variabel Penelitian**

Ghozali dan Ratmono (2013) menjelaskan bahwa penelitian yang melihat hubungan satu variabel dependen terhadap lebih dari satu variabel independen (*explanatory*) disebut analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menerima dampak dari adanya variabel independen. Variabel independen (*explanatory*) adalah variabel yang diduga akan mempengaruhi atau menyebabkan adanya perubahan yang timbul pada variabel dependen (variabel terikat).

Variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Angka Partisipasi Kasar tingkat Sekolah Dasar yang disimbolkan dengan (APK).

2. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan (DAK). Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol, yaitu pendapatan perkapita (INCOME).

### 3.1.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **Variabel Dependen:**

#### **Angka Partisipasi Kasar tingkat SD (APK)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan tingkat pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing tingkat pendidikan. Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan APK tingkat Sekolah Dasar (SD). APK tingkat SD dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang masih sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk 7 - 12 tahun}} \times 100 \quad (3.1)$$

Penelitian ini menggunakan APK yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Bappenas (2004) dalam Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia menjelaskan bahwa terjadi perbedaan

angka antara hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS dan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) karena sistem pendataan yang berbeda. Pertama, Susenas menggunakan pendataan berdasarkan tempat tinggal, sementara Kemendikbud menggunakan data dari laporan sekolah yang memungkinkan terjadinya penghitungan ganda karena adanya anak yang sekolah di lebih dari satu tempat. Kedua, waktu pelaksanaan yang berbeda; data Kemendikbud adalah data pendaftaran pada awal tahun ajaran baru, sedangkan Susenas tidak selalu pada tahun ajaran baru.

### **Variabel Independen:**

#### **1. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

DAU merupakan pengganti dari Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan Inpres sebelum desentralisasi. Variabel yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi *vertical* dan *horizontal imbalance*. Diharapkan variabel ini akan berhubungan positif terhadap peningkatan akses pendidikan.



## **2. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Pendidikan adalah dana alokasi khusus yang yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang diperuntukkan bagi Sekolah Dasar (SD), baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## **3. Pendapatan Perkapita (INCOME)**

Bila pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu pendapatan perkapita. Pendapatan regional perkapita digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan Produk Domestik Regional Bruto perkapita yang dihitung menurut harga yang berlaku (PDRB ADHB). PDRB ADHB digunakan karena menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Berbeda dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yang lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut.

### **3.2. Populasi dan Sampel**

Populasi yang diamati dalam penelitian adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dari seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai data Angka Partisipasi Kasar tingkat Sekolah Dasar yang lengkap dari tahun 2003 sampai 2008
2. Memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan secara kontinyu dari tahun 2003 sampai 2008
3. Memiliki data yang lengkap terkait variabel dalam penelitian, yaitu data Dana Alokasi Umum (DAU), PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, dan jumlah penduduk

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Rincian data tersebut antara lain adalah :

1. Angka Partisipasi Kasar tingkat Sekolah Dasar
2. Realisasi Dana Alokasi Umum
3. Realisasi Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan
4. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
5. Jumlah penduduk

### **3.3.2. Sumber Data**

Data yang berkaitan dengan bidang pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar (SD) diperoleh dari Indikator Utama Sosial Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah terbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketersediaan publikasi cetak maupun digital yang kurang mengenai APK tingkat SD dilengkapi dengan data yang berasal dari situs Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah ([tkpk.jateng.com](http://tkpk.jateng.com)) yang juga memuat data yang berasal dari BPS. Realisasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ([djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)). Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku diperoleh dari PDRB Jawa Tengah terbitan BPS. Data jumlah penduduk diperoleh dari Jawa Tengah dalam Angka.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara mempelajari buku-buku terbitan instansi terkait, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui perpustakaan dan *download* internet.

### 3.5. Metode Analisis

#### 3.5.1. Memilih Pendekatan yang Tepat

Secara sederhana, data panel dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan data (*dataset*) di mana perilaku unit *cross-sectional* (misalnya individu, perusahaan, negara) diamati sepanjang waktu. Gujarati (dikutip oleh Ghazali dan Ratmono, 2013) mengemukakan bahwa dalam memilih model mana yang lebih baik antara *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM), tergantung pada asumsi yang dibuat tentang korelasi antara komponen *error cross-section* ( $\varepsilon_i$ ) dan variabel independen (X). Jika diasumsikan bahwa  $\varepsilon_i$  dan X tidak berkorelasi, REM mungkin lebih tepat sedangkan jika  $\varepsilon_i$  dan X berkorelasi maka FEM yang tepat. Selain itu, dapat pula dipertimbangkan hal-hal berikut ini :

1. Jika T (jumlah data *time series* ) besar dan N (jumlah unit *cross-sectional*) kecil, cenderung hanya terdapat sedikit perbedaan dalam hasil estimasi FEM dan REM. Oleh karena itu, pilihan model tergantung pada kemudahan cara estimasi. Dalam hal ini, FEM mungkin lebih tepat dipilih
2. Ketika N besar dan T kecil maka hasil estimasi kedua model dapat berbeda secara signifikan. Ingat bahwa dalam REM;  $\beta_{1i} = \beta_1 + \varepsilon_i$ , di mana  $\varepsilon_i$  adalah komponen *random cross-sectional*. Sedangkan dalam FEM;  $\beta_{1i}$  diperlakukan sebagai *fixed* bukan *random*. Dalam kasus ini, kesimpulan statistik tergantung pada unit *cross-sectional* dalam sampel. Jika unit *cross-sectional* tidak diambil secara *random*

maka FEM lebih tepat. Namun jika unit *cross-sectional* dalam sampel diambil secara *random* maka REM lebih tepat

3. Jika komponen *error individual*  $\varepsilon_i$  dan variabel independen  $X$  berkorelasi maka hasil REM bias sedangkan FEM tidak bias.
4. Jika  $N$  besar dan  $T$  kecil dan asumsi-asumsi REM terpenuhi maka hasil estimasi REM lebih efisien dibandingkan FEM

Penelitian ini menggunakan pendekatan *random effect model* (REM) untuk mengestimasi data panel. Pendekatan REM dipilih karena penulis memperhitungkan perbedaan yang mungkin terjadi antardaerah ke dalam komponen *error*. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$APK_{it} = \alpha + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + INCOME_{it} + \varepsilon_i + u_{it} \quad (3.2)$$

Keterangan:

$APK_{it}$	= Angka Partisipasi Kasar tingkat Sekolah Dasar pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t
$\alpha$	= Intersep model regresi
$\beta$	= Koefisien slope atau koefisien arah
$DAU_{it}$	= Dana Alokasi Umum pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t
$DAK_{it}$	= Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

$INCOME_{it}$  = Pendapatan perkapita pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

$\varepsilon_i$  = Komponen *error* pada unit observasi ke-i.

$u_{it}$  = Komponen *error* pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

### 3.5.2. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Gujarati (dikutip oleh Ghozali dan Ratmono, 2013) menyatakan bahwa terdapat 11 asumsi utama yang mendasari model regresi linear klasik dengan menggunakan metode *ordinary least square* (OLS) atau yang dikenal dengan asumsi klasik.

1. Model regresi linear: artinya linear dalam parameter seperti dalam persamaan di bawah ini:

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \mu_i \quad (3.3)$$

2. Nilai X diasumsikan non-stokastik: artinya nilai X dianggap tetap dalam sampel yang berulang.
3. Nilai rata-rata kesalahan  $\mu_i$  adalah nol, atau  $E(\mu_i | X_i) = 0$
4. Homoskedastisitas: artinya varian (*variance*) kesalahan atau residual sama untuk setiap periode (Homo = sama, skedastisitas = sebaran) dan dinyatakan dalam bentuk matematis  $Var(\mu_i | X_i) = \sigma^2$
5. Tidak ada autokorelasi antarresidual (antara  $\mu_i$  dan  $\mu_j$  tidak ada korelasi) atau secara matematis  $Cov(\mu_i, \mu_j | X_i, X_j) = 0$
6. Antara  $\mu_i$  dan  $X_i$  saling bebas sehingga  $Cov(\mu_i | X_i) = 0$

7. Jumlah observasi ( $n$ ) harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi. Secara alternatif, jumlah  $n$  lebih besar daripada jumlah variabel bebas
8. Adanya variabilitas dalam nilai  $X_i$ , artinya nilai  $X_i$  harus berbeda
9. Model regresi telah dispesifikasi secara benar. Dengan kata lain, tidak ada bias (kesalahan) spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empirik
10. Tidak ada multikolinearitas yang sempurna antarvariabel bebas
11. Nilai kesalahan  $\mu_i$  terdistribusi secara normal atau  $\mu_i \sim N(0, \sigma^2)$

Apabila ke-11 asumsi klasik diatas terpenuhi, maka menurut teorema Gauss-Markov, metode estimasi *ordinary least square* akan menghasilkan *unbiased linear estimator* dan memiliki varian minimum atau sering disebut *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*. Untuk memenuhi asumsi-asumsi di atas, maka estimasi regresi hendaknya dilengkapi dengan uji-uji yang diperlukan, seperti deteksi normalitas residu, deteksi multikolinearitas, deteksi heteroskedastisitas dan deteksi autokorelasi.

#### **3.5.2.1. Deteksi Normalitas**

Ghozali dan Ratmono (2013) menjelaskan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal. Uji t dan uji F mengasumsikan nilai *residual* mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid, khususnya untuk ukuran sampel kecil.

Pengujian normalitas residual yang banyak digunakan adalah uji Jarque-Bera (*JB-Test*). Uji JB adalah uji normalitas untuk sampel besar (*asymptotic*). Uji JB dapat dilakukan dengan mudah dalam program Eviews yang langsung menghitung nilai JB statistik. Nilai JB selanjutnya dapat dihitung signifikansinya untuk menguji hipotesis berikut:

$H_0$  : *residual* terdistribusi normal

$H_a$  : *residual* tidak terdistribusi normal

Jika hasil uji JB lebih besar dari nilai *chi square* pada tingkat signifikansi yang digunakan, maka tolak hipotesis nol yang berarti tidak berdistribusi normal. Jika hasil uji JB lebih kecil dari nilai *chi square* pada tingkat signifikansi yang digunakan, maka terima hipotesis nol yang berarti *error term* berdistribusi normal. Selain itu, uji JB juga dapat dilakukan dengan melihat tingkat probabilitasnya, jika *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi maka *residual* berdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya, jika *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi maka *residual* tidak terdistribusi normal.

### **3.5.2.2. Deteksi Multikolinearitas**

Ghozali dan Ratmono (2013) menjelaskan bahwa adanya multikolinearitas atau korelasi yang tinggi antarvariabel independen dapat dideteksi dengan beberapa cara, yaitu:

1. Nilai  $R^2$  tinggi, tetapi hanya sedikit (bahkan tidak ada) variabel independen yang signifikan. Jika nilai  $R^2$  tinggi di atas 0,80; maka uji F pada sebagian besar kasus akan menolak hipotesis yang menyatakan



bahwa koefisien *slope* parsial secara simultan sama dengan nol, tetapi uji t individual menunjukkan sangat sedikit koefisien *slope* parsial yang secara statistik berbeda dengan nol.

2. Korelasi antara dua variabel independen yang melebihi 0,80 dapat menjadi pertanda bahwa multikolinearitas merupakan masalah serius
3. *Auxiliary regression*. Multikolinearitas timbul karena satu atau lebih variabel independen berkorelasi secara linear dengan variabel independen lainnya. Salah satu cara menentukan variabel X mana yang berhubungan dengan variabel X lainnya adalah dengan *me-regress* setiap  $X_i$  terhadap variabel X sisanya dan menghitung nilai  $R^2$ .

Hubungan antara F dan  $R^2$  dapat dituliskan dalam rumus berikut:

$$F_i = \frac{R_{x_1.x_2.x_3...x_k}^2 / (k-2)}{(1-R_{x_1.x_2.x_3...x_k}^2) / (n-k+1)} \quad (3.4)$$

Variabel mengikuti distribusi F dengan derajat bebas (df)  $k-2$  dan  $n-k+1$ ,  $n$  adalah ukuran sampel,  $k$  jumlah variabel independen termasuk intersep, dan  $R_{x_1.x_2.x_3...x_k}^2$  adalah koefisien determinasi dalam regresi  $X_i$  terhadap variabel X lainnya. Jika nilai F hitung  $>$  nilai F tabel, maka  $X_i$  berkorelasi tinggi dengan variabel X lainnya. Tanpa menguji semua nilai  $R^2$  *auxiliary*, kita dapat menggunakan kriteria kasar *Klein's rule of thumb* yang menyatakan bahwa multikolinearitas menjadi bermasalah jika  $R^2$  yang diperoleh dari *auxiliary regression* lebih tinggi daripada  $R^2$  keseluruhan yang diperoleh dari *me-regress* semua variabel X terhadap Y.

4. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Setiap variabel menjadi independen menjadi variabel dependen dan di-regress terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah  $Tolerance < 0,10$  atau sama dengan  $VIF > 10$ . Setiap peneliti harus menentukan nilai kolinearitas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai  $Tolerance = 0,10$  sama dengan tingkat kolinearitas 0,90. Walaupun multikolinearitas dapat dideteksi dengan nilai *Tolerance* dan VIF, tetapi peneliti masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang saling berkorelasi.

### 3.5.2.3. Deteksi Heteroskedastisitas

Ghozali dan Ratmono (2013) menjelaskan bahwa umumnya terjadi pada data silang (*cross-section*) daripada data runtun waktu (*time series*). Pada data *cross-section*, biasanya peneliti berhubungan dengan anggota populasi pada satu waktu tertentu seperti individu, perusahaan, industri atau subdivisi seperti negara, kota dan lain-lain. Anggota populasi itu memiliki perbedaan dalam ukuran, seperti perusahaan kecil, menengah, atau besar, *income* rendah, medium, dan

tinggi. Sementara itu pada data *time series*, variabel cenderung urutan besaran yang sama oleh karena data dikumpulkan pada entitas yang sama selama periode waktu tertentu.

Heteroskedastisitas tidak menyebabkan estimator (koefisien variabel independen) menjadi bias karena *residual* bukan komponen menghitungnya. Namun, menyebabkan estimator jadi tidak efisien dan *BLUE* lagi serta *standard error* dari model regresi menjadi bias sehingga menyebabkan nilai t statistic dan F hitung bias (*misleading*). Dampak akhirnya adalah pengambilan keputusan statistik untuk pengujian hipotesis menjadi tidak valid. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas antara lain: (1) Glejser, (2) White, (3) Breusch-Pagan-Godfrey, (4) Harvey, dan (5) Park.

#### **3.5.2.4. Deteksi Autokorelasi**

Ghozali dan Ratmono (2013) menjelaskan bahwa deteksi autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antarkesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi:

a. Uji Durbin Watson (*DW-test*)

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel bebas.

Hipotesis yang akan diuji adalah:

$H_0$  : tidak ada autokorelasi ( $\rho = 0$ )

$H_a$  : ada autokorelasi ( $\rho \neq 0$ )

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada kriteria pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**

**Durbin Watson d test: Kriteria Pengambilan Keputusan**

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_L \leq d \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_U < d < 4 - d_U$

Nilai DW yang diperoleh dari output Eviews, selanjutnya dibandingkan dengan nilai batas bawah ( $d_L$ ) dan nilai batas atas ( $d_U$ ) yang diperoleh dari tabel DW dengan memperhatikan *significance level*, jumlah amatan (T) dan K (jumlah variabel bebas dan intersep).

b. Uji Langrange Multiplier (*LM Test*)

Uji autokorelasi dengan *LM Test*, terutama digunakan untuk amatan di atas 100 observasi. Uji ini memang lebih tepat digunakan dibanding uji DW terutama bila sampel yang digunakan relatif besar dan derajat autokorelasi lebih dari satu. Uji LM akan menghasilkan

statistik Breusch-Godfrey sehingga uji LM juga kadang disebut uji Breusch-Godfrey. Pengujian Breusch-Godfrey (*BG test*) dilakukan dengan *re-regress* variabel pengganggu (*residual*)  $U_t$  menggunakan *autoregressive model* dengan orde  $p$ :

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + \varepsilon_t \quad (3.5)$$

Dengan hipotesis nol  $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$ , dimana koefisien *autoregressive* secara simultan sama dengan nol, menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual, jika  $(n-p) \cdot R^2$  atau  $\chi^2$  hitung lebih besar dari  $\chi^2$  tabel, peneliti dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model.

### 3.5.3. Menilai *Goodness of Fit* Model Regresi

#### 3.5.3.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar variasi total pada variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya dalam model regresi tersebut. Nilai dari koefisien determinasi ialah antara 0 hingga 1. Nilai  $R^2$  yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel dalam model tersebut dapat mewakili permasalahan yang diteliti, karena dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependennya. Nilai  $R^2$  sama dengan atau mendekati 0 menunjukkan variabel dalam model yang dibentuk tidak dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat.

Nilai koefisien determinasi cenderung akan semakin besar apabila jumlah variabel bebas dan jumlah data yang diobservasi semakin banyak. Oleh karena itu, digunakan ukuran *adjusted R<sup>2</sup>* untuk menghilangkan bias akibat adanya penambahan jumlah variabel bebas dan jumlah data yang diobservasi.

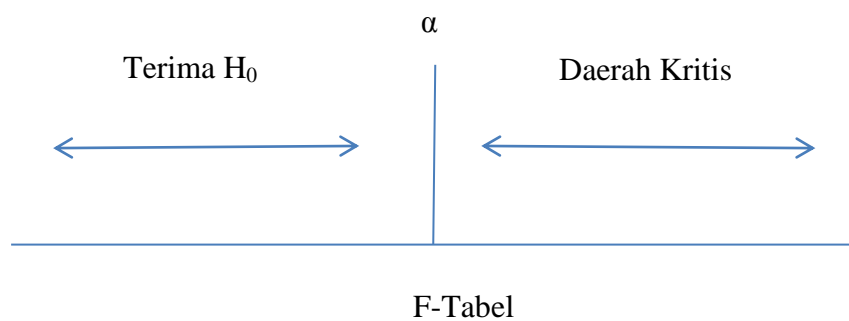
### 3.5.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Uji F-statistik biasanya berupa pengujian terhadap hipotesis berikut:

$H_0$  : Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat

$H_1$  : Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat

**Gambar 3.1**  
**Kriteria Penerimaan  $H_0$  dalam Uji Statistik F**



Kriteria Penerimaan  $H_0$  :

$H_0$  diterima bila F-Statistik < F-Tabel

$H_0$  ditolak bila F-Statistik > F-Tabel

Jika dalam pengujian  $H_0$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linier antara variabel dependen dengan variabel independen.

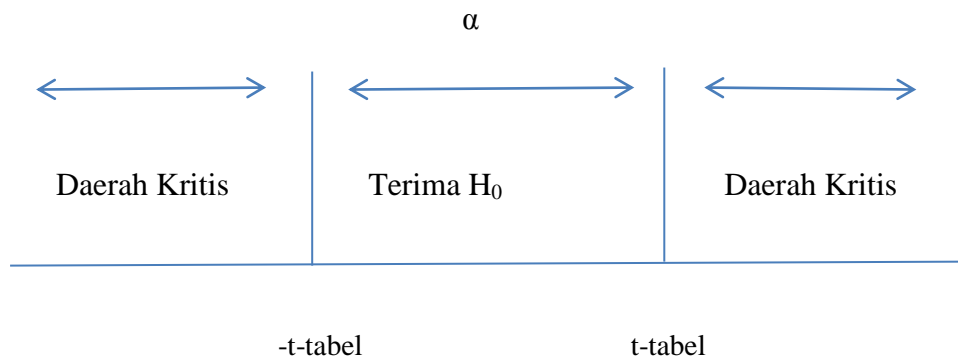
### 3.5.3.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji statistik t biasanya berupa pengujian terhadap hipotesis berikut :

$H_0$  : Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat

$H_1$  : Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat

**Gambar 3.2.**  
**Kriteria Penerimaan  $H_0$  dalam Uji Statistik t**



Pengujian dilakukan dua arah dengan memperhatikan kriteria penerimaan  $H_0$  berikut :

$H_0$  diterima bila  $t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$

$H_0$  ditolak bila  $t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$